



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI  
**SUB UNIT KERJA** : KETUA LEMBAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ABHAN**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **456301**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 486 m2/250 m2 di KOTA SEMARANG  
, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KOTA SEMARANG  
, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 161.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA G INNOVA E MT Tahun 2008, HASIL  
SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA NC12AF2CBI A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI  
Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA AFX12U21C08 M/T Tahun 2014, HASIL  
SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA KIH02N14LO A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI  
Rp. 18.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.111.424.854**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 2.522.424.854**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.522.424.854

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.